

Nama : Dela Zulia Pratiwi

Kelas : 2023 C

Npm : 2313031079

Mata Kuliah : Ekonomi Publik

Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd

UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

SOAL 1

Pemerintah Kabupaten Arunika berencana membangun sistem penerangan jalan lingkungan di sebuah kawasan permukiman yang dihuni 1.200 keluarga. Lampu jalan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan seluruh warga, tetapi pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.

Dalam sebuah forum warga, muncul tiga usulan:

- Usulan A: seluruh biaya pembangunan ditanggung APBD.
- Usulan B: biaya dibagi rata kepada seluruh keluarga melalui iuran bulanan.
- Usulan C: pembangunan ditanggung APBD, tetapi biaya pemeliharaan dibebankan kepada warga melalui iuran.

Hasil wawancara pemerintah menunjukkan bahwa sebagian warga bersedia membayar karena merasa memperoleh manfaat, tetapi sebagian lainnya menyatakan, “Kalau lampunya sudah dipasang, saya tetap bisa menikmati manfaatnya meskipun tidak membayar.”

Pertanyaan:

1. Analisislah apakah penerangan jalan dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai barang publik. Gunakan karakteristik barang publik dalam argumentasi Anda.

Jawaban:

Menurut saya, penerangan jalan lingkungan di Kabupaten Arunika dapat dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki dua karakteristik utama, yaitu *non-excludability* dan *non-rivalry*. Karakteristik *non-excludability* berarti manfaat penerangan jalan sulit dibatasi hanya kepada warga yang membayar. Sebagai contoh, ketika lampu jalan sudah dipasang, warga yang tidak membayar iuran tetap dapat menikmati cahaya yang

dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran bukan merupakan syarat untuk memperoleh manfaat penerangan jalan. Sementara itu, *non-rivalry* berarti penggunaan manfaat oleh satu orang tidak mengurangi manfaat yang diterima orang lain. Ketika satu keluarga menikmati penerangan jalan, keluarga lainnya tetap dapat menikmati cahaya yang sama tanpa mengurangi manfaat yang diterimanya. Dengan demikian, penerangan jalan dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak orang tanpa menimbulkan persaingan dalam memperoleh manfaatnya.

Selain kedua karakteristik tersebut, penerangan jalan juga menghasilkan eksternalitas positif. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di lingkungan tersebut, tetapi juga oleh pengguna jalan lain yang melintas. Penerangan yang memadai dapat membantu pengendara melihat kondisi jalan, mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan rasa aman, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Artinya, manfaat sosial penerangan jalan lebih luas daripada manfaat yang diterima oleh setiap keluarga secara individual. Jika penyediaan penerangan jalan hanya mengandalkan kemampuan dan kemauan warga untuk membayar, jumlah lampu yang dibangun berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena warga dapat menikmati manfaatnya tanpa harus memberikan kontribusi. Oleh karena itu, penerangan jalan memerlukan peran pemerintah dalam penyediaan dan pembiayaannya. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu memperhitungkan biaya pembangunan, listrik, dan pemeliharaan agar penyediaannya tidak membebani anggaran secara berlebihan.

2. Jelaskan masalah *free rider* yang mungkin muncul dan mengapa mekanisme pasar tidak selalu menghasilkan penyediaan barang publik yang optimal.

Jawaban:

Menurut saya, pernyataan warga yang tetap menikmati lampu jalan meskipun tidak membayar merupakan contoh masalah *free rider*, yaitu kondisi ketika seseorang memperoleh manfaat dari suatu barang tanpa ikut menanggung biaya penyediaannya. Hal ini terjadi karena manfaat penerangan jalan tidak dapat dibatasi hanya kepada warga yang membayar. Dari sudut pandang individu, tidak membayar mungkin dianggap lebih menguntungkan karena manfaatnya tetap diperoleh. Namun, jika banyak warga melakukan hal yang sama, dana yang terkumpul akan berkurang sehingga pembangunan dan pemeliharaan lampu berisiko terganggu. Kondisi ini menunjukkan kegagalan mekanisme

pasar karena penyedia sulit memperoleh pembayaran dari seluruh pengguna, sehingga pihak swasta kurang terdorong untuk menyediakan penerangan jalan secara optimal.

Selain itu, terdapat masalah pengungkapan preferensi (*preference revelation problem*), yaitu kesulitan mengetahui kesediaan masyarakat yang sebenarnya untuk membayar barang publik. Warga mungkin membutuhkan penerangan jalan, tetapi memilih tidak membayar karena tetap dapat menikmati manfaatnya. Dalam ekonomi publik, penyediaan barang publik perlu mempertimbangkan manfaat marginal sosial dan biaya marginal. Jika manfaat tambahan bagi masyarakat lebih besar daripada biaya tambahan penyediaannya, penambahan penerangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat berperan melalui pembiayaan APBD untuk menjamin ketersediaan penerangan jalan, sedangkan pembangunan atau pemeliharannya dapat melibatkan pihak swasta melalui kontrak agar pelaksanaannya tetap efisien.

3. Dari tiga alternatif kebijakan di atas, pilih satu kebijakan yang menurut Anda paling tepat. Jelaskan alasan ekonomi publik yang mendukung pilihan tersebut.

Jawaban:

Menurut saya, Usulan A, yaitu seluruh biaya pembangunan penerangan jalan ditanggung melalui APBD, merupakan pilihan yang tepat karena penerangan jalan termasuk barang publik yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat tanpa harus membayar secara langsung. Pembiayaan melalui APBD dapat mengurangi masalah *free rider* dan memungkinkan pemerintah menentukan lokasi pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat keamanan, serta manfaat sosialnya, bukan hanya berdasarkan kesediaan warga membayar. Dari sisi pemerataan, pembiayaan melalui pajak juga berpotensi membagi beban secara lebih adil dibandingkan iuran dengan nominal yang sama bagi setiap keluarga, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.

Namun, Usulan A memiliki kelemahan berupa *opportunity cost*, yaitu anggaran yang digunakan untuk penerangan jalan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagai pembanding, Usulan B yang mengandalkan iuran warga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi berisiko menghadapi masalah *free rider*, biaya penagihan, dan ketidakadilan beban iuran. Sementara itu, Usulan C yang membagi biaya pembangunan melalui APBD dan pemeliharaan melalui iuran warga dapat mengurangi beban pemerintah, tetapi

pemeliharaan berisiko terganggu jika iuran tidak terkumpul. Oleh karena itu, saya memilih Usulan A dengan mempertimbangkan manfaat sosialnya, tetapi pelaksanaannya perlu disertai analisis biaya-manfaat, penentuan prioritas, dan evaluasi kemampuan keuangan daerah. Jika anggaran terbatas, kerja sama dengan pihak swasta dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan tanpa membatasi akses masyarakat terhadap penerangan jalan.

4. Kemukakan satu kelemahan dari kebijakan yang Anda pilih dan tawarkan cara untuk mengurangnya.

Jawaban:

Menurut saya, kelemahan utama Usulan A adalah keterbatasan anggaran daerah dan risiko penggunaan dana yang kurang efisien. Jika pembangunan tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan, anggaran dapat terserap pada wilayah yang manfaat tambahannya relatif kecil, sementara wilayah yang lebih membutuhkan penerangan belum terlayani. Selain itu, pembiayaan sepenuhnya oleh pemerintah berpotensi mengurangi keterlibatan warga dalam pemeliharaan fasilitas jika tidak disertai pengawasan yang baik.

Terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengatasinya menurut saya, pemerintah perlu melakukan analisis biaya-manfaat dan memprioritaskan wilayah yang rawan kecelakaan, memiliki aktivitas malam hari yang tinggi, atau minim penerangan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan lampu LED atau tenaga surya dengan membandingkan biaya investasi, perawatan, dan penghematan jangka panjang. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan melalui pelaporan kerusakan dan pengawasan fasilitas tanpa harus dikenai iuran wajib. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan tidak mengorbankan pelayanan publik lain yang lebih mendesak. Dengan langkah tersebut, manfaat penerangan jalan dapat tetap terjaga, sementara efisiensi anggaran dan keterlibatan masyarakat juga diperhatikan.

SOAL 2

Di Kota Bening terdapat sungai yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi. Sebuah industri pengolahan makanan beroperasi di dekat sungai tersebut. Selama ini industri telah memenuhi izin lingkungan dan membayar pajak sebagaimana ditentukan pemerintah. Namun, hasil pengamatan masyarakat menunjukkan bahwa kualitas air sungai semakin menurun. Industri berpendapat bahwa penutupan atau pembatasan produksi akan mengurangi lapangan pekerjaan. Pemerintah sedang mempertimbangkan empat kebijakan:

- Mengenakan pajak atas limbah yang dibuang ke sungai;
- Memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan teknologi pengolahan limbah;
- Menetapkan batas maksimum limbah dan memberikan sanksi jika dilanggar
- Membiarkan mekanisme pasar bekerja karena perusahaan telah membayar pajak dan memiliki izin usaha.

Pertanyaan:

1. Identifikasi eksternalitas dalam kasus tersebut. Siapa yang menghasilkan eksternalitas dan siapa yang menanggung dampaknya?

Jawaban:

Menurut saya, kasus pencemaran sungai di Kota Bening merupakan contoh eksternalitas negatif dari kegiatan produksi. Eksternalitas negatif terjadi ketika kegiatan ekonomi suatu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam kasus ini, industri pengolahan makanan menghasilkan limbah yang dibuang ke sungai, sedangkan dampaknya ditanggung oleh masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kerugian tersebut dapat berupa meningkatnya biaya memperoleh air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, serta bertambahnya risiko gangguan kesehatan. Biaya ini tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam biaya produksi perusahaan sehingga harga produk belum mencerminkan seluruh biaya yang ditimbulkan bagi masyarakat. Meskipun perusahaan telah membayar pajak dan mematuhi izin lingkungan, pencemaran tetap dapat terjadi karena batas limbah yang diperbolehkan belum tentu menjamin kualitas sungai tetap terjaga.

Pajak umum yang dibayar perusahaan juga tidak secara langsung mencerminkan besarnya pencemaran yang dihasilkan. Selain itu, sungai dapat dikategorikan sebagai sumber daya bersama (*common-pool resource*), karena masyarakat sulit dikecualikan dari pemanfaatannya, tetapi penggunaan dan pencemaran oleh satu pihak dapat mengurangi kualitas air yang tersedia bagi pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum tentu sama dengan tercapainya kondisi lingkungan yang efisien secara sosial.

2. Jelaskan mengapa keberadaan eksternalitas dapat menyebabkan hasil pasar berbeda dari kondisi yang dianggap efisien secara sosial.

Jawaban:

Menurut saya, pencemaran sungai menyebabkan hasil pasar berbeda dari kondisi yang paling efisien bagi masyarakat karena perusahaan hanya memperhitungkan biaya produksi yang ditanggungnya sendiri. Dalam teori ekonomi, biaya tersebut disebut biaya privat marjinal (*marginal private cost* atau MPC). Sementara itu, biaya sosial marjinal (*marginal social cost* atau MSC) mencakup biaya privat ditambah biaya eksternal yang ditanggung masyarakat akibat pencemaran. Hubungannya dapat dituliskan sebagai $MSC = MPC + \text{biaya eksternal marjinal}$. Ketika perusahaan menentukan jumlah produksi berdasarkan biaya privat, biaya kerusakan sungai belum sepenuhnya masuk dalam keputusan produksinya. Akibatnya, perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada jumlah yang optimal secara sosial. Dalam kondisi persaingan pasar, harga produk juga dapat lebih rendah daripada harga yang seharusnya mencerminkan seluruh biaya sosialnya. Situasi ini disebut *overproduction* atau produksi berlebihan dari sudut pandang sosial. Dampaknya adalah munculnya *deadweight loss*, yaitu hilangnya kesejahteraan karena sebagian kegiatan produksi menghasilkan manfaat yang lebih kecil daripada keseluruhan biaya sosial yang ditimbulkannya.

Permasalahan ini terjadi karena perusahaan tidak menanggung seluruh dampak pencemarannya secara langsung. Masyarakat yang dirugikan juga menghadapi kesulitan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan karena jumlah pihak terdampak banyak, kepentingannya berbeda-beda, dan biaya pengumpulan informasi maupun penyelesaian tuntutan cukup tinggi. Dalam teori Coase, negosiasi antara pihak yang terlibat dapat membantu mengatasi eksternalitas apabila hak kepemilikan jelas

dan biaya transaksi rendah. Namun, kondisi tersebut sulit terpenuhi dalam kasus ini. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk memasukkan biaya pencemaran ke dalam keputusan produksi dan mendorong perusahaan mempertimbangkan dampak kegiatannya terhadap masyarakat.

3. Bandingkan dua instrumen kebijakan dari empat alternatif di atas. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Jawaban:

Dua instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran sungai adalah pajak atas limbah dan penetapan batas maksimum limbah yang disertai sanksi.

- a) Pajak atas limbah (*pollution tax* atau pajak Pigou)

Pajak atas limbah merupakan pungutan berdasarkan jumlah atau tingkat pencemaran yang dihasilkan perusahaan. Kelebihannya, perusahaan terdorong memperhitungkan biaya lingkungan dalam kegiatan produksi karena semakin banyak limbah yang dibuang, semakin besar pajak yang harus dibayar. Kebijakan ini mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi pengolahan limbah dan memilih cara pengurangan pencemaran yang paling efisien sesuai kemampuan serta teknologinya. Selain itu, penerimaan pajak dapat digunakan untuk pemulihan sungai dan pemantauan kualitas air. Namun, penentuan tarif yang tepat membutuhkan informasi mengenai kerugian akibat pencemaran dan biaya pengurangannya. Tarif yang terlalu rendah dapat membuat perusahaan memilih membayar pajak daripada mengurangi limbah, sedangkan tarif terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan keuntungan. Pengukuran limbah yang akurat juga diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak.

- b) Batas maksimum limbah dan sanksi (*command-and-control*)

Kebijakan ini menetapkan batas maksimum volume atau tingkat pencemaran yang boleh dibuang perusahaan, disertai sanksi bagi pelanggaran. Kelebihannya, pemerintah dapat menetapkan standar lingkungan secara langsung untuk mencegah pencemaran yang membahayakan masyarakat. Namun, batas yang terlalu longgar dapat membuat perusahaan tetap patuh ketika kualitas sungai terus menurun akibat akumulasi limbah. Perusahaan yang telah memenuhi batas juga belum tentu terdorong mengurangi pencemaran lebih lanjut. Selain itu, standar yang sama bagi semua perusahaan dapat menimbulkan biaya pengurangan limbah yang berbeda

karena kemampuan dan teknologi mereka tidak sama. Efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada pengawasan dan ketegasan sanksi. Dengan demikian, pajak limbah memberikan insentif berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran, sedangkan batas maksimum memberikan kepastian mengenai tingkat pencemaran yang tidak boleh dilampaui. Pemilihannya perlu mempertimbangkan kondisi sungai, kemampuan pengawasan pemerintah, dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi.

4. Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah. Pilih satu instrumen yang paling tepat untuk kasus tersebut. Jangan hanya menjelaskan teori; buatlah argumentasi berdasarkan kondisi kasus.

Jawaban:

Menurut saya, pajak atas limbah dapat dipilih sebagai instrumen utama untuk mengurangi pencemaran sungai di Kota Bening karena mendorong perusahaan menanggung biaya lingkungan yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat. Meskipun perusahaan telah mematuhi izin, kualitas sungai tetap menurun, yang menunjukkan bahwa batas saat ini belum cukup mendorong pengurangan limbah. Melalui pajak, perusahaan terdorong memperbaiki proses produksi, menggunakan teknologi pengolahan limbah, atau mengurangi limbah yang dihasilkan. Perusahaan tetap dapat berproduksi, tetapi harus mempertimbangkan biaya pencemaran dalam keputusannya. Namun, pajak tidak menjamin pengurangan limbah jika perusahaan lebih memilih membayar daripada mengolah limbah. Oleh karena itu, tarif perlu dirancang secara tepat dan diterapkan bertahap agar perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Pemerintah juga perlu memanfaatkan data volume dan kadar limbah dari titik pembuangan serta mengevaluasi kualitas air, biaya produksi, dan dampaknya terhadap tenaga kerja.

Alternatif berupa subsidi pengolahan limbah dapat membantu pembiayaan teknologi yang lebih bersih, tetapi membutuhkan anggaran pemerintah dan berisiko membebankan biaya pencemaran kepada masyarakat. Subsidi juga harus dirancang agar tidak mendorong peningkatan produksi yang memperbesar pencemaran. Sementara itu, tanpa intervensi pemerintah, biaya pencemaran tidak akan otomatis diperhitungkan dalam keputusan perusahaan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan pajak atas limbah sebagai instrumen utama, disertai batas maksimum limbah dan sanksi

untuk mencegah pencemaran berbahaya. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk pemulihan sungai dan pemantauan lingkungan secara transparan sesuai ketentuan anggaran.

5. Bayangkan perusahaan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan menyebabkan biaya produksi naik dan harga produk meningkat. Apakah argumen tersebut otomatis berarti kebijakan pemerintah tidak tepat? Jelaskan.

Jawaban:

Kenaikan biaya produksi dan harga produk tidak otomatis menunjukkan bahwa kebijakan pajak atas limbah keliru. Hal ini perlu dilihat dari eksternalitas negatif yang sebelumnya tidak diperhitungkan perusahaan, sehingga harga produk belum mencerminkan seluruh biaya sosial akibat pencemaran. Pajak limbah bertujuan memasukkan biaya lingkungan ke dalam keputusan produksi. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perlu dinilai dengan membandingkan manfaat pengurangan pencemaran, seperti membaiknya kualitas air, menurunnya biaya air bersih, dan meningkatnya produktivitas pertanian, dengan biaya yang muncul, seperti kenaikan harga, penurunan keuntungan, investasi teknologi, dan kemungkinan berkurangnya tenaga kerja. Kebijakan dapat dinilai bermanfaat secara sosial apabila manfaat lingkungan yang diperoleh lebih besar daripada keseluruhan biaya tambahannya.

Besarnya dampak kebijakan bergantung pada kemampuan konsumen menyesuaikan pembelian dan kemampuan perusahaan mengurangi pencemaran melalui teknologi pengolahan limbah. Jika biaya penyesuaian terlalu tinggi, perusahaan berisiko mengurangi produksi atau tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan peran industri sebagai sumber lapangan kerja di Kota Bening dengan menerapkan pajak secara bertahap, memberikan pendampingan teknologi, dan menyediakan pelatihan bagi pekerja yang terdampak. Dengan demikian, kenaikan biaya dan harga bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pencemaran berkurang, kualitas sungai membaik, dan manfaat lingkungan sebanding dengan biaya ekonomi yang ditimbulkan, tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

SOAL 3

Pemerintah daerah X mengalami penurunan penerimaan sehingga harus mencari tambahan pendapatan sebesar Rp100 miliar per tahun. Pemerintah mempertimbangkan tiga pilihan:

Alternatif 1: menaikkan pajak konsumsi.

Alternatif 2: menaikkan pajak atas kelompok berpendapatan tinggi.

Alternatif 3: mengenakan pungutan khusus atas penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.

Data sederhana yang tersedia:

Kelompok	Pendapatan rata-rata/bulan	Proporsi penduduk	
		Proporsi konsumsi	
Pendapatan rendah	Rp 3 Juta	40%	30%
Pendapatan menengah	Rp 8 Juta	45%	45%
Pendapatan tinggi	Rp 25 Juta	15%	25%

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan yang dipilih harus memenuhi dua tujuan: menambah penerimaan negara/daerah dan tetap memperhatikan keadilan ekonomi.

Pertanyaan:

1. Berdasarkan data tersebut, jelaskan alternatif mana yang berpotensi paling regresif dan mana yang berpotensi lebih progresif. Jelaskan logika Anda, bukan hanya definisinya.

Jawaban:

Alternatif 1, yaitu pajak konsumsi, berpotensi menjadi kebijakan paling regresif karena beban pajak relatif lebih besar bagi kelompok berpendapatan rendah. Berdasarkan data, kelompok rendah menerima 14,0% pendapatan, tetapi menyumbang 30% konsumsi. Jika tambahan penerimaan Rp100 miliar berasal dari pajak konsumsi dan beban dibagi sesuai proporsi konsumsi, kelompok rendah menanggung Rp30 miliar, kelompok menengah Rp45 miliar, dan kelompok tinggi Rp25 miliar. Jika dibandingkan dengan proporsi pendapatan masing-masing, indeks beban terhadap pendapatan kelompok rendah sebesar $30/14 = 2,14$, kelompok menengah sebesar $45/42,1 = 1,07$, dan kelompok tinggi sebesar $25/43,9 = 0,57$. Artinya, beban relatif kelompok rendah sekitar 3,8 kali kelompok tinggi.

Hal ini terjadi karena kelompok berpendapatan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, terutama kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, Alternatif 2, yaitu pajak yang menyasar kelompok berpendapatan tinggi, berpotensi paling progresif karena beban lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar. Kelompok ini menguasai 43,9% pendapatan, sehingga secara prinsip lebih mampu menanggung tambahan pajak tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sementara itu, Alternatif 3, yaitu pungutan kendaraan pribadi di pusat kota, belum dapat dipastikan sifatnya hanya berdasarkan data pendapatan. Jika kepemilikan kendaraan terkonsentrasi pada kelompok menengah ke atas, pungutan cenderung progresif. Namun, jika pekerja berpendapatan rendah bergantung pada sepeda motor untuk bekerja, kebijakan tersebut dapat membebani mereka. Oleh karena itu, penilaian terhadap Alternatif 3 perlu mempertimbangkan data kepemilikan kendaraan, pola perjalanan, dan ketersediaan transportasi umum.

2. Apakah pajak yang paling adil selalu merupakan pajak yang paling efisien? Jelaskan dengan menggunakan konsep *equity* dan *efficiency*.

Jawaban:

Menjawab pertanyaan tersebut, keadilan (*equity*) dan efisiensi (*efficiency*) merupakan dua tujuan kebijakan perpajakan yang berbeda. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan pajak menghasilkan penerimaan tanpa menimbulkan distorsi ekonomi yang berlebihan, sedangkan keadilan berkaitan dengan pembagian beban pajak secara wajar. Keadilan horizontal berarti individu dengan kemampuan ekonomi yang setara diperlakukan secara setara, sedangkan keadilan vertikal berarti individu dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat menanggung beban yang berbeda sesuai prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*).

Perbedaan kedua tujuan tersebut terlihat pada alternatif yang tersedia. Pajak konsumsi atas barang dengan permintaan inelastis relatif mudah dipungut dan dapat menghasilkan penerimaan yang stabil, tetapi berpotensi regresif. Sebaliknya, pajak yang menyasar kelompok berpendapatan tinggi lebih sesuai dengan keadilan vertikal, tetapi dapat mendorong penghindaran pajak, mengurangi insentif investasi, atau mendorong perpindahan aset dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, pungutan kendaraan di pusat kota dapat meningkatkan efisiensi karena membantu mengurangi

kemacetan dan polusi, sekaligus menghasilkan penerimaan. Namun, manfaat tersebut bergantung pada desain kebijakan dan ketersediaan transportasi alternatif. Dengan demikian, kebijakan yang paling adil belum tentu paling efisien, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan keduanya sesuai kondisi daerah.

3. Jika Anda menjadi pengambil keputusan, alternatif mana yang akan Anda pilih? Anda tidak wajib memilih alternatif yang menurut Anda paling adil, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan tersebut.

Jawaban:

Saya memilih Alternatif 2, yaitu kebijakan yang menyasar kelompok berpendapatan tinggi karena lebih memperhatikan keadilan distribusi pendapatan. Kelompok ini menguasai 43,9% pendapatan sehingga relatif lebih mampu menanggung tambahan pajak dibandingkan kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, jika jumlah penduduk satu juta jiwa, kelompok berpendapatan tinggi mencakup 150.000 jiwa. Dengan asumsi total pendapatan tahunan daerah Rp22,5 triliun, kelompok tersebut memperoleh sekitar Rp9,88 triliun. Target penerimaan Rp100 miliar setara sekitar 1,01% dari pendapatan kelompok tersebut. Namun, angka ini hanya ilustrasi dan tidak menjamin target tercapai. Kebijakan juga menghadapi risiko penghindaran pajak dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pungutan harus menggunakan instrumen yang sesuai kewenangan, didukung pendataan dan pengawasan yang baik. Saya memilih alternatif ini karena mengutamakan keadilan vertikal dan perlindungan kelompok berpendapatan rendah.

4. Buatlah satu desain kebijakan alternatif dengan menggabungkan atau memodifikasi ketiga pilihan tersebut agar tujuan penerimaan dan keadilan dapat lebih seimbang.

Jawaban:

Menanggapi hal tersebut, pemerintah dapat menggabungkan ketiga alternatif kebijakan dengan target penerimaan indikatif sebesar Rp100 miliar. Kombinasi ini bertujuan meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperhatikan keadilan pajak, kemampuan membayar, dan dampak kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Rancangan kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Pungutan berbasis aset bernilai tinggi (Rp50 miliar). Mengoptimalkan pungutan daerah yang sah atas properti bernilai tinggi atau kendaraan mewah dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.
- Pungutan kendaraan pribadi di pusat kota (Rp35 miliar). Menerapkan tarif berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan, terutama saat jam sibuk, serta mengarahkan penerimaan untuk perbaikan transportasi umum.
- Pajak konsumsi selektif (Rp15 miliar). Menyasar barang atau jasa nonpokok sesuai kewenangan yang berlaku, dengan melindungi kebutuhan pokok agar tidak membebani kelompok berpendapatan rendah.

Target penerimaan tersebut masih berupa perkiraan yang perlu diuji melalui kajian potensi pajak, biaya administrasi, tingkat kepatuhan, dan respons masyarakat. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dampak setiap kebijakan terhadap pendapatan masyarakat, kegiatan usaha, serta kondisi lalu lintas. Dengan menggabungkan ketiga alternatif, sumber penerimaan daerah menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu jenis pungutan. Selain itu, dominasi pungutan berbasis aset bernilai tinggi diharapkan mendukung keadilan distribusi beban, sedangkan pungutan kendaraan dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi. Dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat, kombinasi ini diharapkan mampu mencapai target penerimaan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

5. Identifikasi satu kelompok masyarakat yang kemungkinan dirugikan oleh desain kebijakan Anda dan jelaskan bagaimana pemerintah dapat mengurangi dampak tersebut.

Jawaban:

Menurut pendapat saya, kelompok yang berpotensi dirugikan adalah pekerja dan pedagang berpendapatan rendah hingga menengah yang bergantung pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, untuk bekerja di pusat kota. Pungutan kendaraan dapat meningkatkan biaya perjalanan sehari-hari sehingga mengurangi pendapatan bersih mereka. Kondisi ini dapat memberatkan pedagang kecil, pekerja informal, dan pengemudi ojek yang pendapatannya terbatas atau tidak tetap. Selain itu, jika transportasi umum belum memadai dan terjangkau, mereka akan kesulitan beralih ke moda transportasi lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan

kemampuan ekonomi kelompok tersebut agar kebijakan pengurangan kemacetan dan polusi tidak menambah beban masyarakat yang rentan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah dapat:

- Memperbaiki transportasi umum melalui penambahan rute, frekuensi, dan tarif yang terjangkau.
- Memberikan keringanan terarah bagi kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil yang memenuhi kriteria.
- Menerapkan pungutan bertahap agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap biaya perjalanan, pendapatan pekerja, kemacetan, dan kualitas udara.

Dengan demikian, kebijakan dapat meningkatkan penerimaan dan efisiensi penggunaan kendaraan sekaligus membantu kelompok masyarakat menengah kebawah. Keberhasilannya perlu dinilai dari penerimaan yang diperoleh, penurunan kemacetan, perbaikan kualitas lingkungan, dan terjaganya akses masyarakat terhadap pekerjaan serta kegiatan ekonomi. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala agar kebijakan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak menimbulkan beban berlebihan bagi kelompok berpendapatan rendah, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah serta seluruh masyarakat.